

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Model *Problem Based Learning* (PBL)

1. Pengertian Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL)

Model *Problem Based Learning* adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inkuiri, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri (menurut Arends dalam Abbas, 2000:13).

Lalu Suyatno (2009 : 58) beranggapan bahwa :

Model pembelajaran berdasarkan masalah adalah proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran dimulai berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata siswa dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman telah mereka miliki sebelumnya (prior knowledge) untuk membentuk pengetahuan dan pengalaman baru.

Model pembelajaran berdasarkan masalah juga mengacu pada model pembelajaran yang lain seperti yang diungkapkan oleh Trianto (2007 : 68) : Model pembelajaran berdasarkan masalah) mengacu pada Pembelajaran Proyek (*Project Based Learning*), Pendidikan Berdasarkan Pengalaman (*Experience Based Education*), Belajar Autentik (*Authentic Learning*), Pembelajaran Bermakna (*Anchored Instruction*).

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan ketrampilan berfikir kritis dan

pemecahan masalah serta mendapatkan pengetahuan konsep- konsep penting, dimana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai ketrampilan mengarahkan diri. Pembelajaran berbasis masalah penggunaannya di dalam tingkat berfikir yang lebih tinggi, dalam situasi berorientasi pada masalah, termasuk bagaimana belajar.

2. Ciri – ciri Model Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL)

Berbagai pengembang menyatakan bahwa ciri utama model pembelajaran berdasarkan masalah ini dalam Trianto (2007 : 68) :

- a. Pengajuan pertanyaan atau masalah
Guru memunculkan pertanyaan yang nyata di lingkungan siswa serta dapat diselidiki oleh siswa kepada masalah yang autentik ini dapat berupa cerita, penyajian fenomena tertentu, atau mendemonstrasikan suatu kejadian yang mengundang munculnya permasalahan atau pertanyaan.
- b. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin.
Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu (IPA, matematika, ilmu-ilmu sosial) masalah yang dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya, siswa dapat meninjau dari berbagai mata pelajaran yang lain.
- c. Penyelidikan autentik.
Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah yang disajikan. Metode penyelidikan ini bergantung pada masalah yang sedang dipelajari.
- d. Menghasilkan produk atau karya.
Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Produk itu dapat juga berupa laporan, model fisik, video maupun program komputer
- e. Kolaborasi.
Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Bekerjasama untuk terlibat dan saling bertukar pendapat dalam melakukan penyelidikan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang disajikan.

Menurut Arends (2008: 42), ciri-ciri model Pembelajaran Berbasis

Masalah terdiri dari:

- 1) Pertanyaan atau masalah perangsang.
Alih-alih mengorganisasikan pelajaran di seputar prinsip akademis atau keterampilan tertentu, Pembelajaran Berbasis Masalah mengorganisasikan pengajaran di seputar pertanyaan dan masalah yang penting secara sosial dan bermakna secara personal bagi siswa. Mereka menghadapi berbagai situasi kehidupan nyata yang tidak dapat diberi jawaban-jawaban sederhana dan ada berbagai solusi yang competing untuk menyelesaikannya.
- 2) Fokus interdisipliner.
Meskipun Pembelajaran Berbasis Masalah dapat dipusatkan pada subjek tertentu (sains, PKn, sejarah), tetapi masalah yang diinvestigasi dipilih karena solusinya menuntut siswa untuk menggali banyak subjek. Sebagai contoh, masalah polusi yang muncul di pelajaran Chesapeake Bay menyangkut beberapa subjek akademik maupun terapan yang meliputi biologi, ekonomi, sosiologi, pariwisata, dan pemerintahan.
- 3) Investigasi autentik.
Pembelajaran Berbasis Masalah mengharuskan siswa untuk melakukan investigasi autentik yang berusaha menemukan solusi riil untuk masalah riil. Mereka harus menganalisis dan menetapkan masalahnya, mengembangkan hipotesis dan membuat prediksi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen (bilamana mungkin), membuat inferensi, dan menarik kesimpulan. Metode-metode investigatif yang digunakan tentu bergantung pada sifat masalah yang diteliti.
- 4) Produksi artefak dan exhibit.
Pembelajaran Berbasis Masalah menuntut siswa untuk mengonstruksikan produk dalam bentuk artefak dan exhibit yang menjelaskan atau mempresentasikan solusi mereka. Bentuk itu bisa berbentuk debat bohong-bohongan, seperti dalam pelajaran “Roots and Wings”; bisa berbentuk laporan, model fisik, video, atau program komputer. Artefak dan exhibit yang nanti akan dideskripsikan, dirancang oleh siswa untuk mendemonstrasikan kepada orang lain apa yang telah mereka pelajari dan memberikan alternatif yang menyegarkan untuk makalah wajib atau ujian tradisional.
- 5) Kolaborasi.
Pembelajaran Berbasis Masalah ditandai oleh siswa-siswa yang bekerja bersama siswa-siswa lain, paling sering secara berpasangan atau dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Bekerja bersama-sama memberikan motivasi untuk keterlibatan secara berkelanjutan dalam tugas-tugas kompleks dan meningkatkan kesempatan untuk melakukan

penyelidikan dan dialog bersama, dan untuk mengembangkan berbagai keterampilan sosial.

Jadi berdasarkan uraian di atas, ciri utama Pembelajaran Berbasis Masalah meliputi pengajuan pertanyaan-pertanyaan atau masalah, memusatkan pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, kerjasama, dan menghasilkan karya serta peragaan. kemudian siswa mengumpulkan informasi mereka telah ketahui untuk memecahkan masalah tersebut. Siswa dapat memilih masalah yang dianggap menarik untuk dipecahkan sehingga mereka terdorong berperan aktif dalam belajar.

1. Kelebihan dan Kekurangan Menggunakan Model Pembelajaran *Problem Based Learning (PBL)*

Selain manfaatnya, pembelajaran berbasis masalah juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagaimana yang diungkapkan Sanjaya (2007 : 218) sebagai suatu model pembelajaran, pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa kelebihan diantaranya :

- 1) Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan teknik yang cukup.
- 2) Menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan yang baru bagi siswa.
- 3) Meningkatkan motivasi dan aktivasi pembelajaran siswa.
- 4) Membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata.
- 5) Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Disamping itu, PBL dapat mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil maupun proses belajarnya.
- 6) Mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk meyesuaikan dengan pengetahuan baru.
- 7) Memberi kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata.
- 8) Mengembangkan motivasi siswa untuk secara terus menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

Memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata.

- 9) Memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata.

Dari kelebihan tersebut dapat dipahami bahwa pembelajaran berbasis masalah membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah dan keterampilan intelektualnya. Para peserta didik belajar dengan keterlibatan langsung dalam pengalaman nyata atau simulasi serta menjadi pembelajar yang mandiri.

Selain kelebihan yang telah dikemukakan tersebut pembelajaran berbasis masalah juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu :

1. Membutuhkan persiapan pembelajaran (alat, problem, konsep) yang kompleks.
2. Sulitnya mencari problem yang relevan.
3. Sering terjadi konsepsi.
4. Memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses penyelidikan.

Sanjaya (2007 : 219) mengemukakan beberapa kelemahan model pembelajaran berbasis masalah, yaitu :

- 1) Manakala siswa tidak memiliki minat atau mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba.
- 2) Keberhasilan Strategi pembelajaran berbasis masalah membutuhkan waktu yang cukup lama.
- 3) Tanpa pemahaman mengenai alasan mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan mempelajari apa yang ingin mereka pelajari.

Adapun kelemahan-kelemahan lainnya dalam menerapkan pembelajaran berbasis masalah seperti yang diungkapkan oleh Akinoglu et all dalam bukunya Nurhasanah (2007 : 22) :

- 1) Akan menyulitkan guru untuk mengubah pola mengajarnya.

- 2) Membutuhkan lebih banyak waktu siswa untuk memecahkan situasi-situasi baru ketika situasi-situasi ini pertama diperkenalkan di dalam kelas.
- 3) Kelompok atau individu dapat menyelesaikan pekerjaannya menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat.
- 4) Pembelajaran berbasis masalah memerlukan materi dan penelitian yang lebih banyak.
- 5) Sulit mengimplementasikan PBL jika hanya belajar di dalam kelas.
- 6) Sulit memberikan penilaian dalam pembelajaran.

Guru adalah pendidik yang membelajarkan siswa, maka guru harus melakukan pengorganisasian dalam belajar, menyajikan bahan belajar dengan pendekatan pembelajaran tertentu dan melakukan evaluasi hasil belajar, guru profesional selalu berusaha mendorong siswa agar berhasil dalam belajar. Kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam model pembelajaran berbasis masalah ini bukan berarti PBL merupakan model pembelajaran yang kurang efektif untuk diterapkan dalam proses pembelajaran, akan tetapi kekurangan-kekurangan dalam penerapan model pembelajaran berbasis masalah yang dikemukakan di atas, menuntut guru sebagai pendidik harus kreatif dalam meminimalisir serta berusaha mencari solusi untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut.

B. Tinjauan Mengenai Enam Topi Berpikir (*Six Thinking Hats*)

1. Pengertian Enam Topi Berpikir (*Six Thinking Hats*)

Metode Enam Topi Berpikir (*Six Thinking Hats*) merupakan suatu metode berpikir yang diciptakan oleh Dr. Edward De Bono. Edward De Bono merupakan seorang pakar dalam mengajarkan keterampilan berpikir. Enam Topi Berpikir (*Six Thinking Hats*) adalah metode untuk mengerjakan satu jenis kegiatan berpikir pada satu saat. Metode ini merupakan alat untuk mengarahkan perhatian karena metode ini mengarahkan perhatian kita kepada aspek tertentu saja dalam berpikir.

Enam Topi Berpikir (*Six Thinking Hats*) merupakan sebuah metode yang melihat bahwa otak manusia memiliki berbagai sudut pandang yang berbeda dalam berpikir. Edward De Bono (2007: 95-96) menyatakan bahwa ada enam topi dengan warna yang berbeda-beda. Setiap warna mewakili satu jenis kegiatan berpikir. Keenam warna tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Topi Putih
Fakta, angka-angka, informasi. Informasi apa yang kita punya? Informasi apa yang perlu kita cari?
- b. Topi Merah
Emosi, perasaan, intuisi. Bagaimana perasaan saya tentang hal ini sekarang?
- c. Topi Hitam
Kehati-hatian. Kebenaran, penilaian, pencocokan data. Apa datanya cocok? Apakah akan berhasil? Apakah aman? Apakah bisa dilaksanakan?
- d. Topi kuning
Sisi yang menguntungkan, manfaat, penghematan. Mengapa ini bisa dilaksanakan? Apa keuntungannya? Mengapa ini baik dilaksanakan?
- e. Topi Hijau
Eksplorasi, proposal, saran-saran, ide-ide baru. Tindakan-tindakan alternatif. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Adakah ide lain?
- f. Topi Biru
Berpikir tentang berpikir. Kendalikan kegiatan berpikir. Simpulkan posisi kita sekarang. Tetapkan langkah berpikir selanjutnya. Tetapkan program. Pandangan menyeluruh yang mengontrol proses.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat terdapat perbedaan karakter pada masing-masing topi. Tujuan dari konsep topi tersebut bukan untuk menempatkan seseorang dalam golongan-golongan yang tertentu, melainkan untuk mendorong seseorang menggunakan semua jenis pikiran itu.

2. Kelebihan Menggunakan Enam Topi Berpikir (*Six Thinking Hats*)

Metode Enam Topi Berpikir (*Six Thinking Hats*) merupakan metode alternatif yang mudah dipahami dan digunakan dalam pembelajaran untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Sebagaimana Dana (2007) menyatakan bahwa:

Keenam konsep topi berpikir amat sederhana untuk ditangkap dan dimengerti. Keenam konsep tersebut juga mudah diterapkan. Terdapat dua tujuan utama terhadap keenam konsep berpikir itu. Tujuan yang pertama adalah menyederhanakan berpikir dengan mengizinkan seorang pemikir menyelesaikan suatu hal pada suatu saat. Tujuan utama yang kedua dari keenam konsep topi berpikir yaitu mengizinkan suatu peralihan dalam berpikir.

Dari pendapat tersebut, dikemukakan bahwa metode Enam Topi Berpikir (*Six Thinking Hats*) ini mudah diterapkan. Keuntungan metode Enam Topi Berpikir (*Six Thinking Hats*) juga diungkapkan oleh Hidayat (2008), sebagai berikut:

- 1) Menciptakan kesamaan kondisi pemikiran, sehingga tercipta “bahasa pemikiran” yang sama, mengoptimalkan kerja otak dan fokus.
- 2) *Diversi* keragaman pemikiran orang banyak akan menghasilkan pemikiran lebih baik.
- 3) Membantu anggota tim untuk berpikir tanpa dipengaruhi kerakturnya. Setiap orang yang menggunakan metode ini sudah mempunyai jalur berpikir yang sudah ditentukan oleh warna topi, sehingga seseorang yang berpikir menggunakan metode ini akan sulit untuk menghadirkan karakternya.
- 4) Menghilangkan “Ego” masing-masing orang. Setiap orang yang berpikir akan memikirkan suatu masalah secara objektif, sehingga “Ego” yang ada akan terhapus dikarenakan setiap orang berpikir dengan jalur berpikir metode ini.
- 5) Mengurangi perdebatan. Metode ini mempunyai aturan main yang jelas, sehingga setiap orang dapat mengungkapkan pendapatnya.
- 6) Metode ini mengoptimalkan fungsi otak kita karena keterpaksaan untuk berpikir di masing-masing jalur topi.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode Enam Topi Berpikir (*Six Thinking Hats*) merupakan metode yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa bila diterapkan dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran PKn. Metode ini dapat digunakan untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya dengan cara melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, sehingga siswa tidak hanya cerdas tetapi juga terampil dalam berpikir.

3. Langkah-langkah Menggunakan Enam Topi Berpikir (*Six Thinking Hats*)

Terdapat dua cara dalam menggunakan metode Enam Topi Berpikir (*Six Thinking Hats*), antara lain penggunaan sesuai dengan kebutuhan sesaat dan penggunaan yang sistematis.

a. Penggunaan Sesuai dengan Kebutuhan Sesaat

Penggunaan sesuai dengan kebutuhan ini merupakan hal yang paling umum terjadi. Suatu saat salah satu topi dapat digunakan untuk mengganti topi lainnya. Di sini seseorang dapat menyarankan penggantian topi sesuai dengan kebutuhan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Topi yang disarankan itu mungkin hanya akan dipakai selama dua atau tiga menit, selanjutnya pemikir dapat menggantinya sesuai dengan kebutuhan. Topi itu memberi jalan untuk mengganti alur pemikiran.

b. Penggunaan yang Sistematis

Dalam penggunaan yang sistematis, urutan penggunaan topi berpikir sudah diatur sebelumnya dan pemikir menjalankan sesuai dengan urutan. Hal ini dilakukan apabila ada kebutuhan untuk membahas suatu subjek secara cepat dan efektif. Urutan tersebut ditentukan dengan menggunakan topi biru yang merancang program tentang masalah yang menjadi subjek. Metode ini juga bermanfaat apabila ada perselisihan atau ketidaksepahaman antara individu terhadap suatu hal dan individu-individu itu tidak menggunakan cara berpikir

yang benar. De Bono (2007: 121) menyatakan bahwa penggunaan yang berurutan ini dapat ditentukan sendiri dengan aturan sebagai berikut:

- 1) Setiap topi dapat digunakan lebih dari satu kali.
- 2) Umumnya yang terbaik adalah menggunakan topi kuning sebelum menggunakan topi hitam karena sulit bersikap positif setelah bersikap penuh kritik.
- 3) Topi hitam digunakan dengan dua cara. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kelemahan suatu ide. Dengan demikian, topi ini harus diikuti oleh topi hijau, yang bertugas mencari cara mengatasi kelemahan. Yang kedua adalah penggunaan topi hitam untuk melakukan penilaian.
- 4) Topi hitam selalu digunakan untuk penilaian terakhir terhadap suatu ide. Penilaian terakhir ini selalu harus diikuti oleh topi merah. Tujuannya adalah agar pemikir dan peserta lain mengetahui bagaimana perasaan tentang ide itu setelah menilainya.
- 5) Jika ada perasaan tertentu yang kuat tentang suatu subjek, pakailah topi merah untuk mengeluarkan perasaan-perasaan itu.
- 6) Jika tidak ada perasaan-perasaan yang mengganggu, segera gunakan topi putih untuk mengumpulkan informasi. Setelah topi putih, gunakan topi hijau untuk memunculkan berbagai alternatif. Kemudian, timbang alternatif itu dengan menggunakan topi kuning, diikuti oleh topi hitam. Lalu, pilih satu alternatif dan pertimbangkan alternatif itu dengan topi hitam, kemudian topi merah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam menggunakan topi pemikiran secara berurutan dapat dilakukan bervariasi sesuai dengan kebutuhan. De Bono (2007: 121) menyatakan bahwa “perbedaan utama urutan-urutan di atas adalah perbedaan antar dua situasi yaitu mencari ide dan bereaksi terhadap suatu ide”. De Bono (2007: 122) menguraikan urutan penggunaan topi berpikir dalam mencari ide sebagai berikut:

- Putih : Kumpulkan informasi.
- Hijau : Eksplorasi lebih lanjut dan temukan alternatif-alternatifnya.
- Kuning: Nilai manfaat dan kemungkinan yang bisa dilakukan setiap alternatifnya.
- Hijau : Kembangkan lebih lanjut alternatif-alternatifnya yang paling menjanjikan dan lakukan pilihan.
- Biru : Simpulkan dan nilai apa yang telah dicapai sejauh ini (dalam proses berpikir).

Hitam : Buat penilaian terakhir terhadap alternatif yang dipilih.

Merah : Simak apa yang kita rasakan tentang alternatif yang dipilih.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan topi dalam mencari ide didahului dengan mengumpulkan informasi atau data-data. Kemudian mencari alternatif-alternatif lain. Setelah itu, menilai kelemahan dari setiap alternatif tersebut. Selanjutnya, memilih dan menentukan satu alternatif yang paling meyakinkan dari alternatif-alternatif yang lain. Lalu, menyimpulkan nilai apa yang telah dicapai sejauh ini dalam proses berpikir. Langkah selanjutnya yaitu membuat penilaian terakhir terhadap alternatif yang dipilih. Terakhir, mengungkapkan perasaan tentang alternatif yang dipilih tersebut.

Selain itu De Bono juga menguraikan urutan penggunaan topi berpikir dalam bereaksi terhadap suatu ide. Urutan pada cara ini berbeda dengan urutan dalam mencari ide, pada urutan ini informasi mengenai latar belakang masalah telah diketahui. Urutan tersebut diuraikan oleh De Bono,(2007: 122) sebagai berikut:

Merah : Simak perasaan yang ada tentang ide tersebut.

Kuning : Cari manfaat ide tersebut.

Hijau : Lihat apakah ide tersebut bisa diubah untuk memperkuat manfaat yang ditemukan dengan topi kuning dan mengatasi masalah yang ditemukan topi hitam.

Putih : Cari informasi yang ada untuk membantu memperbaiki ide tersebut agar lebih diterima (kalau perasaan topi merah menentang ide tersebut).

Hijau : Kembangkan bentuk terakhir.

Hitam : Nilai bentuk terakhir.

Merah : Temukan bagaimana perasaan kita tentang hasil akhir.

Berdasarkan paparan tersebut, terlihat bahwa dalam bereaksi terhadap suatu ide dapat didahului dengan menyatakan perasaan kita terhadap ide tersebut yang memang sebelumnya sudah ada. Setelah itu mencari manfaat dari ide itu dan

melihat apakah ide itu dapat diubah untuk memperkuat manfaat dan mengatasi masalah atau tidak. Apabila perasaan menentang ide tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mencari informasi yang ada untuk membantu memperbaiki ide tersebut agar lebih diterima. Setelah itu mengembangkan alternatif atau ide lain tersebut dan menilainya. Kemudian mengungkapkan perasaan kita terhadap hasil akhir itu.

Adapun urutan pendek yang dapat digunakan menurut De Bono (2007: 123) yaitu sebagai berikut:

- Kuning/Hitam/Merah : Untuk menilai suatu ide dengan cepat.
- Putih/Hijau : Untuk mencari ide.
- Hitam/Hijau : Untuk menyempurnakan ide yang sudah ada.
- Biru/Hijau : Untuk menyimpulkan dan mendata alternatif-alternatif.
- Biru/Kuning : Untuk melihat apakah proses berpikir yang sedang kita lakukan bermanfaat.

Berdasarkan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam menggunakan enam topi berpikir dapat disimpulkan bahwa penggunaan topi berpikir itu dapat dilakukan dengan cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Keenam topi itu biasanya digunakan satu per satu dalam alur berpikir atau digunakan sesekali dalam suatu keadaan. Dalam penggunaan yang sistematis, urutan topi dapat diatur sebagai suatu program yang memandu proses berpikir.

C. Tinjauan Mengenai Berpikir Kritis

1. Pengertian Berpikir

Berpikir merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar yang berhubungan dengan aktivitas mental.

Seperti yang dikemukakan oleh Kuswana (2011: 1) bahwa:

Arti kata pikir adalah akal budi, ingatan, angan-angan. “Berpikir” artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. “Berpikiran” artinya mempunyai pikiran, mempunyai akal. “Pikiran” yaitu hasil “berpikir, dan “pemikiran” merupakan proses, cara, perbuatan memikir, sedangkan “pemikir” adalah orang cerdas, pandai, serta hasil pemikirannya dimanfaatkan orang lain.

Lalu Plato (Suryabrata, 2008: 54) beranggapan bahwa ‘berpikir itu berbicara dalam hati’. Selanjutnya Garreth (Kuswana: 2011: 2) mengemukakan bahwa ‘berpikir merupakan perilaku yang seringkali tersembunyi atau setengah tersembunyi di dalam lambang atau gambaran, ide, konsep yang dilakukan seseorang’.

Persamaan persepsi mengenai berpikir menurut para ahli tersebut ialah sama-sama mengungkapkan bahwa berpikir itu ialah aktivitas mental yang secara sadar ataupun tidak sadar terjadi di dalam hati maupun ingatan seseorang mengenai suatu hal tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa berpikir merupakan gambaran mengenai ide atau konsep yang dilakukan seseorang.

Beberapa ahli lain memberikan definisi berpikir, yaitu menurut Ross (Kuswana: 2011: 2), ‘berpikir merupakan aktivitas mental dalam aspek teori dasar mengenai objek psikologis’. Selanjutnya Valentine (Kuswana: 2011: 2) mengemukakan bahwa:

”Berpikir dalam kajian psikologis secara tegas menelaah proses dan pemeliharaan untuk suatu aktivitas yang berisi mengenai “bagaimana” yang dihubungkan dengan gagasan-gagasan yang diarahkan untuk beberapa tujuan yang diharapkan”.

Kemudian Gilmer (Kuswana: 2011: 2) menyatakan bahwa ‘berpikir merupakan suatu pemecahan masalah dan proses penggunaan gagasan atau lambang-lambang pengganti suatu aktivitas yang tampak secara fisik.’ Selain itu, ia mendefinisikan bahwa berpikir merupakan suatu proses dari penyajian suatu peristiwa internal dan eksternal, kepemilikan masa lalu, masa sekarang dan masa depan yang satu sama lain saling berinteraksi.

Persamaan pengertian mengenai berpikir menurut Ross, Valentine dan Gilmer yaitu ketiganya sama-sama mengkaji pengertian berpikir dari segi psikologis yaitu merupakan suatu aktivitas mental yang berisi mengenai gagasan-gagasan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari ketiga pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa berpikir merupakan suatu aktivitas mental, baik berupa tindakan yang disadari maupun tidak sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari mengenai suatu hal tertentu. Berpikir dapat juga diartikan sebagai proses mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu dalam ingatan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa berpikir adalah berbicara dalam hati sebagai proses mempertimbangkan sesuatu hingga mencapai suatu keputusan.

2. Keterampilan Berpikir

Mengenai kecerdasan berpikir siswa, para ahli sepakat bahwa secara intelektual, siswa selalu menunjukkan perbedaan. Hal ini terlihat dari cepatnya tanggapan siswa terhadap rangsangan yang diberikan dalam kegiatan belajar mengajar dan lambatnya tanggapan siswa terhadap rangsangan yang diberikan guru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Djamarah *et al.* (2006: 79) bahwa:

Tinggi rendahnya kreativitas siswa dalam mengolah pesan dari bahan pelajaran yang baru diterima bisa dijadikan tolak ukur dari kecerdasan seorang siswa. Kecerdasan seorang anak terlihat seiring dengan meningkatnya kematangan usia anak. Daya pikir anak bergerak dari cara berpikir kongkret ke arah cara berpikir abstrak. Anak-anak usia SD atau SMP sudah mulai dapat berpikir abstrak. Berdasarkan IQ anak, ditentukan klasifikasi kecerdasan seseorang dengan perhitungan tertentu. Dari IQ pula diketahui persamaan dan perbedaan kecerdasan seseorang.

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa setiap anak mempunyai pola pikir yang disesuaikan dengan tingkatan pendidikannya dan setiap siswa

mempunyai kecerdasan berpikir yang berbeda tergantung dari cepat atau lambatnya siswa memberikan tanggapan terhadap pembelajaran.

Edward De Bono (2007: 24-25) menyatakan bahwa menyamakan kecerdasan dengan kemampuan berpikir akan memunculkan dua simpulan yang merugikan dalam pendidikan, yaitu:

- 1) Kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi terhadap siswa-siswa yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi karena mereka secara otomatis juga pemikir yang baik.
- 2) Tidak ada yang bisa dilakukan pada siswa yang tidak memiliki kecerdasan yang tinggi karena mereka tidak akan pernah jadi pemikir yang baik.

Selanjutnya Edward menyatakan bahwa hubungan antara kecerdasan dan kemampuan berpikir mirip dengan hubungan antara mobil dan pengendaranya. Sebuah mobil yang hebat bisa jadi dikendarai dengan buruk. Sedangkan mobil yang tak begitu hebat mungkin dikendarai dengan baik. Kehebatan si mobil adalah potensi untuk mobil itu, sama seperti kecerdasan juga merupakan suatu potensi. Keterampilan mengendarai menentukan bagaimana mobil itu dipakai. Keterampilan berpikir menentukan bagaimana kecerdasan digunakan.

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa keterampilan berpikir merupakan suatu proses menarik sebuah kesimpulan terhadap suatu hal dengan menghubungkan fakta-fakta atau informasi-informasi yang ada. Lebih lanjut lagi Sutrisno mengungkapkan bahwa:

Berdasarkan tahapan dalam pengajaran keterampilan berpikir tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahap identifikasi komponen-komponen prosedural, siswa diperkenalkan pada keterampilan dan langkah-langkah khusus yang diperlukan dalam keterampilan tersebut. Ketika mengajarkan keterampilan

berpikir, siswa diperkenalkan pada kerangka berpikir yang digunakan untuk menuntun pemikiran siswa.

Selanjutnya, guru memberikan instruksi dan pemodelan secara eksplisit, misalnya tentang kapan keterampilan tersebut dapat digunakan. Instruksi dan pemodelan ini dimaksudkan supaya siswa memiliki gambaran singkat tentang keterampilan yang sedang dipelajari, sehingga instruksi dan pemodelan ini harus relatif ringkas.

Setelah itu, tahap berikutnya yaitu latihan terbimbing. Tujuannya adalah memberikan bantuan kepada anak agar nantinya bisa menggunakan keterampilan tersebut secara mandiri. Dalam tahapan ini guru memegang kendali atas kelas dan melakukan pengulangan-pengulangan.

Tahap terakhir yaitu latihan bebas dimana guru mendesain aktivitas sedemikian rupa sehingga siswa dapat melatih keterampilannya secara mandiri, misalnya berupa pekerjaan rumah. Jika ketiga langkah pertama telah diajarkan secara efektif, maka diharapkan siswa akan mampu menyelesaikan tugas atau aktivitas ini 95% - 100%. Latihan mandiri tidak berarti sesuatu yang menantang, melainkan sesuatu yang dapat melatih keterampilan yang telah diajarkan.

Latihan-latihan yang intensif merupakan satu hal yang tidak kalah penting dalam pengajaran keterampilan berpikir, selain beberapa aspek yang telah disebutkan di atas. Latihan rutin yang dilakukan siswa akan berdampak pada efisiensi dan otomatisasi keterampilan berpikir yang telah dimiliki siswa. Pembelajaran keterampilan berpikir kritis dapat dilakukan dengan pendekatan melalui strategi khusus dan prosedur, baik menggunakan spontanitas maupun

dirancang secara sistematis, serta spesifik, luas atau bersifat umum. Adey *et al.*

(Kuswana, 2011: 25) mengungkapkan bahwa:

Suatu program keterampilan berpikir merupakan pendekatan dalam pendidikan yang dilakukan oleh guru dan dirancang secara terstruktur. Program ini sering diidentikkan dengan pengembangan pembelajaran kognitif sebagai pelaksanaan dari kurikulum yang ada.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, berpikir erat kaitannya dengan kognisi. Kata “kognisi” berasal dari bahasa latin “*cognoscere*” yang artinya “mengetahui” atau “sebagai pemahaman terhadap pengetahuan” atau “kemampuan untuk memperoleh suatu pengetahuan tertentu”. Menurut Rita L Atkinson (Kuswana, 2011: 79) ‘kognisi pada abad ke-19 mengurus proses mental, seperti persepsi, daya ingat, penalaran, pilihan keputusan, pemecahan masalah dan metode yang digunakan untuk introspeksi’.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kuswana (2011: 80) bahwa ‘secara umum, terminologi “kognisi” mengacu pada semua aktivitas mental yang terlibat dalam menerima informasi, memahami, menyimpan, membuka dan menggunakan’. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kognisi berhubungan dengan hal-hal berikut:

- 1) Parasensorik dan persepsi, proses yang memungkinkan kita untuk menerima informasi dari dunia (misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan sensasi, taktil atau persepsi).
- 2) Proses mental yang terlibat dalam menghadirkan informasi dan mengakuinya sebagai sesuatu yang bermakna, merasakan pentingnya informasi berkaitan dengan apa yang sudah diketahui, pengorganisasian informasi, memutuskan

apa yang penting dan apa yang tidak penting, menyimpan informasi untuk kemudian mengambilnya saat diperlukan.

- 3) Menggunakan informasi untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan, untuk memecahkan masalah, untuk berkomunikasi dan sejenisnya.

Keterampilan berpikir erat hubungannya dengan pengembangan pembelajaran kognitif, karena mengacu pada semua aktivitas mental yang terlibat dalam menerima informasi, memahami, menyimpan, membuka dan menggunakan. Keterampilan berpikir ini dapat dilatih dan dikembangkan oleh siswa melalui berbagai strategi pembelajaran baik secara mandiri maupun oleh guru sebagai pendidik.

3. Pengertian Berpikir Kritis

Burner (Wijaya, 1997: 70) mengemukakan bahwa ‘berpikir kritis adalah kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkan ke arah yang lebih sempurna’.

Berpikir kritis (*critical thinking*) adalah proses mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi. Informasi tersebut bisa didapatkan dari hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat atau komunikasi.

Pendapat tersebut mengungkapkan bahwa berpikir kritis menggunakan pemikiran dasar dalam proses menganalisis suatu argumen atau permasalahan hingga mencapai suatu pengertian tersendiri yang berlandaskan fakta atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

R. Martindas (Zafri: 2012) menyatakan bahwa ‘berpikir kritis adalah aktivitas mental yang dilakukan untuk mengevaluasi kebenaran sebuah pernyataan. Umumnya evaluasi berakhir dengan putusan untuk menerima, menyangkal atau meragukan kebenaran pernyataan yang bersangkutan’.

Dari beberapa pengertian berpikir kritis menurut para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa berpikir kritis merupakan aktivitas mental yang dilakukan dengan menganalisis sesuatu hingga mendapatkan suatu pendapat atau argumen tersendiri yang sesuai dengan fakta dan data yang ada. Dapat dikatakan bahwa berpikir kritis adalah suatu proses berpikir yang bertujuan untuk membuat keputusan yang rasional yang diarahkan untuk memutuskan apakah meyakini atau melakukan sesuatu. Berpikir kritis difokuskan ke dalam pengertian sesuatu yang penuh kesadaran dan mengarah pada sebuah tujuan. Tujuan dari berpikir kritis akhirnya memungkinkan kita untuk membuat keputusan.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat dilihat persamaan mengenai berpikir kritis, yaitu suatu proses pemecahan masalah yang berlandaskan informasi dan data akurat yang mengarah kepada sebuah tujuan untuk membuat keputusan atau kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Proses berpikir kritis dapat digambarkan seperti metode ilmiah. Steven (Zafri: 2012) mengutarakan bahwa ‘berpikir kritis adalah metode tentang penyelidikan ilmiah, yaitu: mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, mencari dan mengumpulkan data-data yang relevan, menguji hipotesis secara logis dan evaluasi serta membuat kesimpulan yang reliable’. Sejalan dengan pendapat Krulik dan Rudnick (Zafri: 2012) yang menyatakan bahwa:

Berpikir kritis adalah berpikir yang menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek dari situasi masalah. Termasuk di dalam berpikir kritis adalah mengelompokkan, mengorganisasikan, mengingat dan menganalisis informasi. Berpikir kritis memuat kemampuan membaca dengan pemahaman dan mengidentifikasi materi yang diperlukan dengan yang tidak ada hubungan. Hal ini juga berarti dapat menggambarkan kesimpulan dengan sempurna dari data yang diberikan, dapat menentukan ketidakkonsistenan dan kontradiksi di dalam kelompok data. Berpikir kritis adalah analitis dan reflektif.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara menyeluruh dalam memecahkan suatu permasalahan. Berpikir kritis berarti mengerahkan semua kemampuan seseorang dalam berpikir, artinya seseorang yang berikir kritis akan menganalisis suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang, mencari fakta dan data atau informasi yang akurat hingga akhirnya membuat sebuah kesimpulan yang meyakinkan. Halpen (Achmad: 2007) mengemukakan bahwa:

Berpikir kritis adalah memberdayakan keterampilan atau strategi kognitif dalam menentukan tujuan. Proses tersebut dilalui setelah menentukan tujuan, mempertimbangkan, dan mengacu langsung kepada sasaran-merupakan bentuk berpikir yang perlu dikembangkan dalam rangka memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan berbagai kemungkinan, dan membuat keputusan ketika menggunakan semua keterampilan tersebut secara efektif dalam konteks dan tipe yang tepat.

Pendapat senada dikemukakan Anggelo (Achmad: 2007),

‘berpikir kritis adalah mengaplikasikan rasional, kegiatan berpikir yang tinggi, yang meliputi kegiatan menganalisis, mensintesis, mengenal permasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan, dan mengevaluasi’.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan berpikir kritis terdiri dari merumuskan, menganalisis, memecahkan masalah, menyimpulkan dan mengevaluasi. Berpikir kritis juga biasa disebut *directed thinking*, karena berpikir langsung kepada fokus yang akan dituju.

4. Tujuan Berfikir Kritis

Berpikir kritis menekankan pada penentuan permasalahan, penilaian informasi, penggambaran kesimpulan dan pemecahan masalah. Penerapan

berpikir kritis dapat menjauhkan seseorang dari keputusan yang keliru, tidak bermoral, dan tergesa-gesa. Sapriya (2012: 87) mengungkapkan bahwa:

Tujuan berpikir kritis ialah untuk menguji suatu pendapat atau ide. Termasuk di dalam proses ini adalah melakukan pertimbangan atau pemikiran yang didasarkan pada pendapat yang diajukan. Pertimbangan-pertimbangan ini biasanya didukung oleh kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari berpikir kritis adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam mengenai suatu pendapat atau ide. Muhfahroyin (Nursiti: 2013) mengemukakan beberapa alasan tentang perlunya keterampilan berpikir kritis, yaitu:

- 1) Pengetahuan yang didasarkan pada hafalan telah didiskreditkan; individu tidak akan menyimpan ilmu pengetahuan dalam ingatan mereka untuk penggunaan yang akan datang;
- 2) Informasi menyebar luas begitu pesat, sehingga tiap individu membutuhkan kemampuan yang dapat disalurkan, agar mereka dapat mengenali berbagai permasalahan yang terjadi;
- 3) kompleksitas pekerjaan modern menuntut adanya pemikiran yang mampu menunjukkan pemahaman, dan membuat keputusan dalam dunia kerja;
- 4) Masyarakat modern membutuhkan individu yang mampu menggabungkan informasi dari berbagai sumber, serta mampu membuat keputusan.

Dari kedua pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa berpikir kritis adalah suatu kegiatan atau suatu proses menganalisis, menjelaskan, mengembangkan atau menyeleksi ide, mencakup mengategorikan, membandingkan dan melawan, menguji argumen dan asumsi, menyelesaikan dan mengevaluasi kesimpulan induksi dan deduksi, menentukan prioritas dan membuat pilihan. Berpikir kritis meliputi dua langkah besar yakni melakukan proses berpikir nalar (*reasoning*) dan diikuti dengan pengambilan keputusan/pemecahan masalah (*deciding/problem solving*).

Dengan demikian dapat pula diartikan bahwa tanpa kemampuan yang memadai dalam hal berpikir nalar (deduktif, induktif dan reflektif), seseorang tidak dapat melakukan proses berpikir kritis secara benar. Berpikir kritis berfokus pada apakah meyakini atau melakukan sesuatu mengandung pengertian bahwa siswa yang berpikir kritis tidak hanya percaya begitu saja apa yang dijelaskan oleh guru. Siswa berusaha mempertimbangkan penalarannya dan mencari informasi lain untuk memperoleh kebenaran.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir kritis disusun guna mencapai kemampuan untuk membuat keputusan terhadap isu-isu yang muncul di masyarakat sehingga mampu bersikap serta mengambil keputusan dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses belajar mengajar seorang siswa harus mampu berpikir kritis dan berani mengeluarkan ide-idenya. Dengan berpikir kritis, siswa dapat mengatur, mengubah, atau memperbaiki pikirannya sehingga dapat bertindak lebih cepat dan tepat. Ini berarti memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih penggunaan konsep-konsep dasar untuk berpikir agar siswa memiliki struktur konsep yang dapat berguna dalam menganalisis dan mengevaluasi suatu permasalahan. Dalam hal ini guru sebagai fasilitator sekaligus motivator bagi siswa berkewajiban untuk menolong siswa dalam mengembangkan kecerdasan dan kemampuan berpikir kritisnya.

5. Karakteristik Berpikir Kritis

Berpikir kritis merupakan sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka

sendiri. Wade (Achmad: 2007) mengidentifikasi delapan karakteristik berpikir kritis, yakni meliputi:

- 1) Kegiatan merumuskan pertanyaan
- 2) Membatasi permasalahan.
- 3) Menguji data-data.
- 4) Menganalisis berbagai pendapat.
- 5) Menghindari pertimbangan yang sangat emosional.
- 6) Menghindari penyederhanaan berlebihan.
- 7) Mempertimbangkan berbagai interpretasi.
- 8) Mentoleransi ambiguitas.

Karakteristik lain yang berhubungan dengan berpikir kritis menurut Beyer (Achmad: 2007), yaitu Watak (*dispositions*), Kriteria (*criteria*), Argumen (*argument*), Pertimbangan atau pemikiran (*reasoning*), Sudut pandang (*point of view*) dan Prosedur penerapan kriteria (*procedures for applying criteria*).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai keterampilan berpikir kritis memiliki sikap sangat terbuka, menghargai sebuah kejujuran, respek terhadap berbagai data dan pendapat, respek terhadap kejelasan dan ketelitian, mencari pandangan-pandangan lain yang berbeda dan akan berubah sikap ketika terdapat sebuah pendapat yang dianggapnya baik. Kemudian dalam berpikir kritis seseorang mempunyai sebuah kriteria tersendiri yang dapat berlandaskan sumber yang kredibel, teliti, tidak bias, bebas dari logika yang keliru, logika yang konsisten, dan pertimbangan yang matang. Keterampilan berpikir kritis akan meliputi kegiatan pengenalan, penilaian, dan menyusun argumen yang dilandasi oleh data-data. Seseorang yang berpikir kritis akan menguji hubungan antara beberapa pernyataan atau data dan akan memandang sebuah fenomena dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya penerapan berpikir kritis sangat kompleks dan prosedural. Prosedur

tersebut akan meliputi merumuskan permasalahan, menentukan keputusan yang akan diambil, dan mengidentifikasi perkiraan-perkiraan.

6. Strategi Peningkatan Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran PKn

Kemampuan berpikir kritis dapat ditingkatkan dengan cara-cara tertentu.

Lebih lanjut Ennis (Hassoubah, 2008: 91) mengemukakan cara atau strategi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, antara lain:

1. Mencari pernyataan yang jelas dari setiap pertanyaan.
2. Mencari alasan.
3. Berusaha mengetahui informasi dengan baik.
4. Memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya.
5. Memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan.
6. Berusaha tetap relevan dengan ide utama.
7. Mengingat kepentingan yang asli dan mendasar.
8. Mencari alternatif.
9. Bersikap dan berpikir terbuka.
10. Mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu.
11. Mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila memungkinkan.
12. Bersikap secara sistematis dan teratur dengan bagian-bagian dari keseluruhan masalah.
13. Peka terhadap tingkat keilmuan dan keahlian orang lain.

Lebih lanjut Wright *et al.* (Hassoubah, 2008: 96-110) mengemukakan beberapa cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis di dalam kelas atau berinteraksi dengan orang lain, diantaranya:

Membaca dengan kritis, meningkatkan daya analisis, mengembangkan kemampuan observasi/mengamati, meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan bertanya dan refleksi, metakognisi, mengamati “model” dalam berpikir kritis, diskusi yang “kaya” dan evaluasi berpikir.

Membaca kritis dalam pembelajaran PKn merupakan suatu kebutuhan yang utama karena sangat erat dengan berpikir kritis. Membaca kritis dapat dilakukan dengan cara mengamati, menghubungkan, membuat pertanyaan, merefleksikan, meringkas, mengevaluasi serta membandingkan agar mampu

meningkatkan daya analisis dan sebagai usaha dalam menerima pendapat atau pandangan orang lain.

Dalam pembelajaran PKn mengembangkan kemampuan observasi sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa ingin tahu yang besar, sehingga akan mendorong seseorang untuk melakukan pengamatan yang lebih teliti dan mendalam. Selain itu dengan rasa ingin tahu yang besar, maka siswa akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang belum diketahui atau hanya untuk memastikan suatu pendapat atau ide tertentu.

Metakognisi merupakan sebuah cara dalam memahami berpikir sendiri, serolah mengamati dan mengarahkan pemikiran secara sengaja atau sadar. Kemudian siswa diharapkan mampu mengamati model dalam berpikir kritis yang bertujuan untuk membantu siswa membayangkan, menjelaskan dan melaksanakan kegiatan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari.

Diskusi yang “kaya” memberikan sebuah pengalaman yang berharga bagi siswa karena dengan diskusi yang “kaya” ini siswa dapat melibatkan dirinya secara aktif dengan tujuan meningkatkan keberanian siswa dalam mengeluarkan pendapat belajar untuk dapat menghargai pandangan orang lain.

Evaluasi berpikir kritis dalam pembelajaran PKn merupakan sebuah penilaian dengan menggunakan kriteria pengukuran dan prestasi berpikir siswa. Adapun Wright (Hassoubah, 2008: 111-112) mengemukakan kriteria-kriteria seseorang dikatakan sudah berpikir kritis, diantaranya:

1. Menghadapi tantangan demi tantangan dengan alasan-alasan dan contoh.
2. Memberikan contoh-contoh atau argumentasi yang berbeda dari yang sudah ada.

3. Menerima pandangan dan saran dari orang lain untuk mengembangkan ide-ide baru.
4. Mencari dan memaparkan hubungan antara masalah yang didiskusikan dengan masalah atau pengalaman lain yang relevan.
5. Menghubungkan masalah khusus yang menjadi subjek diskusi dengan prinsip yang lebih bersifat umum.
6. Menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan beraturan.
7. Meminta klarifikasi.
8. Meminta elaborasi.
9. Menanyakan sumber informasi.
10. Berusaha untuk memahami.
11. Mendengarkan dengan hati-hati.
12. Mendengarkan dengan pikiran terbuka.
13. Berbicara dengan bebas.
14. Bersikap sopan.
15. Mencari dan memberikan ide dan pilihan yang bervariasi.

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan berpikir kritis dapat dilatih pada siswa melalui pendidikan berpikir, yaitu melalui belajar menalar, dimana proses berpikir diperlukan keterlibatan aktivitas si pemikir itu sendiri. Salah satu pendekatan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, adalah memberi sejumlah pertanyaan, membimbing dan mengkaitkan dengan konsep yang telah dimiliki siswa sebelumnya.

Seorang guru diharapkan tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan dan konsep-konsep saja melainkan harus dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini sangat penting karena dapat meningkatkan pula kecerdasan berpikir siswa sehingga akan berguna kelak ketika mereka terjun di masyarakat dengan berbagai permasalahan yang lebih kompleks. Kemampuan berpikir kritis sangat penting karena dengan kemampuan berpikir kritis ini siswa menjadi lebih cerdas dalam mengambil sebuah keputusan atau kesimpulan dalam setiap permasalahan yang dihadapinya.

7. Indikator Berpikir Kritis

Komalasari (2010: 266) Ennis membagi indikator keterampilan berpikir kritis ke dalam lima kelompok di antaranya, memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, membuat inferensi/kesimpulan, membuat penjelasan lebih lanjut, mengatur strategi dan taktik. Kelima indikator keterampilan berpikir tersebut diuraikan lebih lanjut pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Indikator Keterampilan Berpikir Kritis Siswa

No	Berpikir Kritis	Sub Berpikir Kritis	Penjelasan
1.	<i>Elementary Clarification</i> (memberikan penjelasan sederhana)	a. Memfokuskan pertanyaan	1) Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan 2) Mengidentifikasi kriteria-kriteria untuk mempertimbangkan jawaban yang mungkin 3) Menjaga kondisi pikiran
		b. Menganalisis argumen	1) Mengidentifikasi kesimpulan 2) Mengidentifikasi alasan yang dinyatakan 3) Mengidentifikasi alasan yang tidak dinyatakan 4) Mengidentifikasi kerelevanan dan ketidakrelevanan 5) Mencari persamaan dan perbedaan 6) Merangkum

		c. Bertanya dan menjawab pertanyaan klarifikasi dan pertanyaan yang menentang	1) Mengapa? 2) Apa intinya? 3) Apa contohnya? 4) Bagaimana menerapkan pada kasus tersebut?
2.	<i>Basic Support</i> (Membangun keterampilan dasar)	a. Mempertimbangkan kredibilitas suatu sumber	1) Ahli 2) Tidak ada <i>conflict inters</i> 3) Menggunakan prosedur yang ada
		b. Mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi	1) Ikut terlibat dalam menyimpulkan 2) Dilaporkan oleh pengamat sendiri 3) Mencatat hal-hal yang diinginkan
3.	<i>Inference</i> (Kesimpulan)	a. Membuat deduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi	1) Kelompok yang logis 2) Kondisi yang logis
		b. Membuat induksi dan mempertimbangkan hasil induksi	1) Membuat generalisasi 2) Membuat kesimpulan dan hipotesis
		c. Membuat dan mempertimbangkan nilai keputusan	1) Latar belakang fakta 2) Penerapan prinsip-prinsip 3) Memikirkan alternatif

4.	Membuat penjelasan lebih lanjut	a. Mendefinisikan Asumsi	1) Penawaran secara implisit 2) Asumsi yang diperlukan
5.	<i>Strategies and Tactic</i> (strategi dan taktik)	a. Memutuskan suatu tindakan	1) Mengidentifikasi masalah 2) Merumuskan alternatif yang memungkinkan 3) Memutuskan hal-hal yang akan dilakukan secara tentatif dan <i>me-review</i>

Sumber: Ennis (Komalasari, 2010: 267-268)

Indikator-indikator tersebut dalam prakteknya dapat bersatu membentuk sebuah kegiatan atau terpisah-pisah hanya beberapa indikator saja. Belajar berpikir kritis merupakan tugas yang tidak ringan.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan berpikir kritis adalah komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa. Guru harus mampu melihat kondisi fisik maupun psikis siswa. Artinya guru sebagai pembimbing siswa harus mampu mengatur strategi yang tepat dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa sehingga siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya.

D. Tinjauan Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, cerdas dan cinta terhadap tanah airnya. PKn menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan pada

setiap jenjang pendidikan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa Indonesia pada setiap warga negaranya.

A.S Hornby (Wuryan, 2008: 2) mengemukakan bahwa 'PKn merupakan suatu pelajaran tentang pemerintahan dan kewajiban-kewajiban warga negara yang berkaitan dengan negara atau antar warga negara'. Lebih lanjut lagi Maftuh dan Sapriya (2005: 321), mendefinisikan PKn sebagai berikut:

Program pendidikan atau mata pelajaran yang memiliki tujuan utama untuk mendidik siswa agar menjadi warga negara yang baik, demokratis dan bertanggungjawab. Program PKn ini memandang siswa dalam kedudukannya sebagai warga negara, sehingga program-program, kompetensi atau materi yang diberikan kepada peserta didik diarahkan untuk mempersiapkan mereka mampu hidup secara fungsional sebagai warga masyarakat dan warga negara yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang baik, materi yang diberikan kepada siswa diarahkan untuk mempersiapkan mereka agar mampu hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik.

Sejalan dengan pendapat tersebut Somantri (2001: 299), mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orangtua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya penjelasan pasal 39 ayat 2 UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:

Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha membekali peserta didik dengan pengetahuan dasar dan kemampuan dasar berkenaan dengan

hubungan warga Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa Negara.

Pendapat lain dikemukakan oleh Cogan (Nurmalina, 2008: 3) yaitu bahwa 'PKn sebagai mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para warga negara muda untuk mendorong peran aktif mereka di masyarakat setelah mereka dewasa'. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan warga negara yang turut aktif atau terlibat dalam berbagai kegiatan kenegaraan yang merupakan salah satu ciri warga negara yang baik. Partisipasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik dengan tenaga, pikiran maupun materi.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran PKn bukan hanya mengajarkan berbagai konsep kenegaraan saja, melainkan mengajarkan siswa untuk memposisikan dirinya sebagai warga negara yang baik yang mengetahui akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, selain itu PKn juga mengajarkan bagaimana hubungan antar sesama warga negara untuk bersikap dalam kehidupan nyata, sehingga tercipta kehidupan yang damai.

a. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Sumarsono *et al.* (2008: 3) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memenuhi pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila.

Pendidikan kewarganegaraan diperlukan demi keutuhan dan tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Sumarsono *et al.* (2008: 4) menyatakan bahwa:

Warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi

masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu mata pelajaran yang bertujuan memberikan pemahaman kepada warga negara akan hak dan kewajibannya.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa negara yang baik adalah yang memiliki kepedulian terhadap keadaan yang lain, memegang teguh prinsip etika dalam berhubungan dengan sesama, berkemampuan membuat dan menentukan gagasan atau ide-ide kritis dan berkemampuan membuat dan menentukan pilihan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang baik.

Selanjutnya, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Permendiknas No.22 tahun 2006 adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Sementara Hamalik (2001: 88) mengemukakan tujuan Pendidikan

Kewarganegaraan, yaitu :

- a. Menanamkan, memupuk dan mengembangkan rasa beragama dengan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan saling menghormati sesama insane beragama.
- b. Memupuk dan mengembangkan rasa kekeluargaan dalam hidup sebagai anggota masyarakat dan kasih sayang terhadap umat manusia.
- c. Memupuk dan mengembangkan rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air yang sehat.

- d. Memupuk dan mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi warga negara yang demokratis yang berbudi luhur, cakap dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa dan negara serta mendahulukan kewajiban daripada haknya.
- e. Menanamkan, memupuk dan mengembangkan sifat dan sikap kewiraan (keberanian berdasarkan kebenaran dan keadilan).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan PKn bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*), cerdas, kreatif, kritis, partisipatif dan bertanggungjawab. Warga negara yang bertanggungjawab (*civic responsibilities*) artinya bertanggungjawab terhadap Tuhan, alam, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara serta bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Warga negara yang cerdas (*civic intelligence*) berarti cerdas secara moral, spiritual dan emosional. Warga negara yang kritis yaitu warga negara yang mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Warga negara yang kritis mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dengan menganalisis dan memberikan alternatif pemecahan masalah tersebut. Kemudian warga negara yang partisipatif artinya warga negara yang mempunyai jiwa sosial tinggi dan dengan penuh kesadaran yang tinggi melibatkan diri secara langsung dalam proses pengambilan keputusan atau dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Lebih lanjut Winataputra (Rahmat, 2009: 8) mengemukakan bahwa ada tiga dimensi PKn, yaitu 'PKn sebagai program kurikuler, PKn sebagai program akademik dan PKn sebagai program kultural'. Ketiga dimensi tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan sehingga dapat membentuk warga negara yang baik dan cerdas.

Untuk menjabarkan tujuan dalam praktik PKn, menurut Somantri (2001: 280-281) tujuan PKn harus diperinci dalam tujuan kurikuler yang meliputi:

- a. Ilmu pengetahuan, meliputi hierarki: fakta, konsep, dan generalisasi/teori.
- b. Keterampilan Intelektual:
 - 1) Dari keterampilan yang sederhana sampai keterampilan yang kompleks seperti mengingat, menafsirkan, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan menilai;
 - 2) Dari penyelidikan sampai kesimpulan yang sah....,
- c. Sikap: nilai, kepekaan dan perasaan. Tujuan PKn banyak mengandung soal-soal afektif, karena itu tujuan PKn yang seperti slogan harus dapat dijabarkan.
- d. Keterampilan sosial: tujuan umum PKn harus bisa dijabarkan dalam keterampilan sosial yaitu keterampilan yang memberikan kemungkinan kepada siswa untuk secara terampil dapat melakukan dan bersikap cerdas serta bersahabat dalam pergaulan hidup sehari-hari

Berdasarkan pengertian tersebut, menunjukkan bahwa terdapat banyak aspek yang harus dicapai dalam pelajaran PKn. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan meningkatkan kualitas mengajar para guru di lapangan. Selain itu guru harus mampu melakukan berbagai alternatif dalam pembelajaran agar siswa dapat juga mengembangkan kemampuan belajarnya terutama kemampuan dalam berpikir kritis. Melalui metode *Problem Based Learning* (PBL) tipe Enam Topi Berpikir (*Six Thinking Hats*) siswa diajak atau diarahkan untuk berpikir kritis, rasional dan kreatif dalam proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga dapat lebih meningkatkan pemahaman siswa dalam pelajaran PKn.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari PKn itu adalah untuk mengembangkan pendidikan demokrasi yang mencakup tiga fungsi pokok, yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggungjawab warga negara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*).

b. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Sumarsono *et al.* (2008: 3) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila.

Pendidikan Kewarganegaraan diperlukan demi keutuhan dan tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sumarsono *et al.* (2008: 4) menyatakan bahwa warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu mata pelajaran yang bertujuan memberikan pemahaman kepada warga negara akan hak dan kewajibannya.

PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai fungsi untuk membentuk warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berbudi luhur, serta setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut senada dengan isi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 2006, Depdiknas (2006: 2), yang menyatakan fungsi dari mata pelajaran PKn, yaitu:

Sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang baik (to be a good citizenship), cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia yang merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Adapun fungsi Pkn menurut Somantri (2001: 166), yaitu:

Usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar menjadi internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk melandasi tujuan nasional, yang diwujudkan dalam integrasi pribadi dan perilaku sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pembelajaran PKn diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada siswa untuk belajar dalam menginternalisasikan moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan agar tujuan dari pendidikan nasional dapat tercapai yang diwujudkan dalam integrasi pribadi dan perilaku sehari-hari.

Adapun tujuan PKn menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Selanjutnya tujuan PKn menurut NCSS (*National Council for the Social Studies*) adalah:

- a. Pengetahuan dan keterampilan guna membantu memecahkan masalah dewasa ini.
- b. Kesadaran terhadap pengaruh sains dan teknologi pada peradaban serta manfaatnya untuk memperbaiki nilai kehidupan.
- c. Kesiapan guna kehidupan ekonomi yang efektif.

- d. Kemampuan untuk menyusun berbagai pertimbangan terhadap nilai-nilai untuk kehidupan yang efektif dalam dunia yang selalu mengalami perubahan.
- e. Menyadari bahwa kita hidup dalam dunia yang terus berkembang yang membutuhkan kesediaan untuk menerima fakta baru, gagasan baru, serta tata cara hidup yang baru.
- f. Peran serta dalam proses pembuatan keputusan melalui pernyataan pendapat kepada wakil-wakil rakyat, para pakar, dan spesialis.
- g. Keyakinan terhadap kebebasan individu serta persamaan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh konstitusi.
- h. Kebanggaan terhadap prestasi bangsa, penghargaan terhadap sumbangan yang diberikan bangsa lain serta dukungan untuk perdamaian dan kerjasama.
- i. Menggunakan seni yang kreatif untuk mensensitifkan dirinya sendiri terhadap pengalaman manusia yang universal serta pada keunikan individu.
- j. Mengasihani serta peka terhadap kebutuhan, perasaan, dan cita-cita umat manusia lainnya.
- k. Pengembangan prinsip-prinsip demokrasi serta pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari (Wuryan dan Syaifullah, 2008: 76-77).

Pada dasarnya PKn bertujuan membentuk warga negara yang baik, warga negara yang kreatif, warga negara yang bertanggungjawab, warga negara yang cerdas, warga negara yang kritis, dan warga negara yang partisipatif. Warga negara yang bertanggungjawab (*civic responsibilities*) mengandung arti bertanggungjawab terhadap dirinya, terhadap Tuhannya, terhadap manusia lain, terhadap lingkungan alam, serta terhadap masyarakat dan bangsa serta negaranya. Warga negara yang cerdas (*civic intelligence*) dalam arti cerdas secara moral, cerdas spiritual, dan cerdas emosioanl. Warga negara yang kritis adalah warga negara yang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya, serta kemauan kuat untuk memberikan alternatif pemecahan masalah tersebut. Kemudian warga negara yang partisipatif yakni warga negara dengan penuh kesadaran yang tinggi untuk melibatkan diri atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, mengingat

membuat keputusan merupakan salah satu dari kompetensi atau kemampuan dasar warga negara. Adapun kompetensi dasar yang lainnya adalah memperoleh informasi serta menggunakan informasi, ketertiban, berkomunikasi, kerjasama, dan melakukan berbagai macam kepentingan secara benar (Wuryan dan Syaifullah, 2008: 77).

Selanjutnya Branson (Wuryan dan Syaifullah, 2008: 78) menyarankan pembelajaran PKn harus mengandung tiga komponen penting, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak kepribadian (*civic disposition*). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengetahuan kewarganegaraan berkenaan dengan substansi atau informasi yang harus diketahui oleh warga negara, seperti pengetahuan tentang sistem politik, pemerintahan, konstitusi, undang-undang, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan sebagainya. Sementara itu, keterampilan kewarganegaraan berkaitan dengan kemampuan atau kecakapan intelektual, sosial, dan psikomotorik. Keterampilan intelektual yang penting baik terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggungjawab, antara lain keterampilan berpikir kritis, meliputi keterampilan mengidentifikasi dan mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan sikap atau pendapat berkenaan dengan persoalan-persoalan publik.

Watak dan kepribadian kewarganegaraan berkaitan dengan sifat-sifat pokok karakter pribadi maupun karakter publik warga negara yang mendukung terpeliharanya demokrasi konstitusional. Menurut Sapriya (Wuryan & Syaifullah, 2008: 78) sifat karakter pribadi warga negara antara lain tanggungjawab moral,

disiplin diri, dan hormat terhadap martabat setiap manusia. Sedangkan sifat karakter publik antara lain kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, hormat terhadap aturan hukum (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi.

Berkenaan dengan kecerdasan moral (*moral intelligence*) yang hendak dibangun melalui pendidikan kewarganegaraan, menurut pendapat Michelle Borba (Wuryan & Syaifullah, 2008: 78) meliputi: empati, kesadaran, pengendalian diri, respek, kebaikan, toleran, dan kejujuran. Selanjutnya ditegaskan bahwa membangun kecerdasan moral tersebut berlangsung secara bertahap, artinya proses tersebut tidaklah berjalan dengan mudah melainkan akan dihadapkan pada banyak kendala dan tantangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Pkn adalah mata pelajaran yang menekankan pada nilai moral dan norma, serta membekali siswanya dengan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menjadi warga negara yang baik. PKn bertujuan mendidik siswanya agar mampu berpikir secara kritis melalui proses pembelajaran di sekolah yang dapat menjadi pegangan hidup dalam menghadapi kehidupan nyata di masa yang akan datang. Pkn juga bertujuan agar siswa dapat berperan aktif dan mampu memposisikan dirinya dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta di dunia internasional.

c. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan

Pada dasarnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini digunakan untuk membentuk karakter dan menjadikan warga negara yang baik, yang dapat

berprilaku sesuai dengan aturan yang berlaku dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, serta menjunjung tinggi nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.

Menurut A.Aziz Whab (1977) dan Sri Wuryan (2008, h. 9-10), mengemukakan bahwa karakteristik dari PPKn adalah:

lahirnya warga negara dan warga masyarakat yang berjiwa Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengetahui hak dan kewajiban, dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab. Agar dapat membuat keputusan secara tepat dan cepat, baik untuk dirinya maupun orang lain. Warga negara yang tidak mencemari ait dan tidak merusak lingkungan”.

Pendidikan Kewarganegaraan ini memiliki misi (Sapriya, 2005: 321)

sebagai berikut :

- a. PKn sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekkan politik (*political literacy*) dan kesadaran berpolitik (*political awareness*) serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi.
- b. PKn sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.
- c. PKn sebagai pendidikan nilai, yang berarti melalui PKn diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri siswa, sehingga mendukung bagi upaya nation dan *character building*.

Dari uraian mengenai misi PKn tersebut dapat dilihat bahwa mata pelajaran PKn memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh mata pelajaran yang lain, yaitu PKn sebagai pendidikan politik, PKn sebagai pendidikan hukum dan PKn sebagai pendidikan nilai atau moral. Ini berarti bahwa PKn bukan hanya memberikan teori atau konsep mengenai negara saja melainkan juga pemahaman

tentang politik, hukum dan nilai atau moral serta norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

d. Ruang Lingkup Mata Pelajaran PKn

Dalam Standar Isi (BNSP, 2006) dijelaskan mengenai ruang lingkup

Pendidikan Kewarganegaraan, yakni meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi : Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan Negara, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
- 2) Norma, hokum dan peraturan, meliputi : Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
- 3) Hak asasi manusia meliputi : Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan Internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- 4) Kebutuhan warga Negara meliputi : Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga Negara.
- 5) Konstitusi Negara meliputi : Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar Negara dengan konstitusi.
- 6) Kekuasaan Politik, meliputi : Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintahan pusat, Demikrasi dan sistem politik, Budaya Politik, Budaya Demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem Pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
- 7) Pancasila meliputi : Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- 8) Globalisasi meliputi : Globalisasi di Lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

Definisi di atas menekankan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan keseluruhan program sekolah, dimana berbagai pengalaman, minat serta kepentingan-kepentingan seperti kepentingan pribadi, masyarakat, dan negara diwujudkan dalam kualitas pribadi seseorang. Bahkan bahan-bahan civic education meliputi pengaruh positif dari pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di luar sekolah. Hal ini perlu untuk dipertimbangkan dalam penyusunan bahan pelajaran *civic education* agar tujuan pelajaran ini dapat dicapai dengan baik, yakni siswa dapat memahami, mengapresiasi cita-cita nasional dan dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Somantri (2001: 159), mendefinisikan PKn sebagai berikut:

Pendidikan Kewarganegaraan adalah seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk mencapai salah satu tujuan Pendidikan IPS.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa Pkn merupakan suatu kajian keilmuan yang terdiri dari beberapa bidang keilmuan dan PKn adalah salah satu yang paling berpengaruh dalam kemajuan Pendidikan IPS. Persamaan persepsi dari para ahli tersebut mengenai Pkn yaitu bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang kaya akan muatan materi karena PKn terdiri dari beberapa bidang keilmuan, oleh karena itu PKn dapat dilihat dari beberapa sudut keilmuan. PKn akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya kehidupan sosial.

Sedangkan dalam Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2006: 2) ditegaskan bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship*) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial-budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat tiga hal pokok yang dimiliki oleh mata pelajaran PKn, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan. Ketiga hal tersebut merupakan bekal bagi siswa untuk meningkatkan kecerdasan multidimensional, sehingga mampu menjadi warga negara yang baik (*to be a good citizenship*) untuk membangun keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

E. Analisis dan Pengembangan Materi Pembelajaran

1. Keluasan dan Kedalaman Materi

Keluasan materi merupakan gambaran seberapa banyak materi yang dimasukkan kedalam materi yang di berikan kepada siswa. Sedangkan kedalaman materi merupakan

Berikut ini merupakan poin-poin mengenai materi Menapaki Jalan Terjal Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia atau pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusi) semester 1 kelas XI :

- a. Pengertian Pelanggaran HAM
- b. Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM
- c. Penyebab Pelanggaran HAM
- d. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

- e. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM
- f. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM
- g. Perilaku yang Mendukung Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Dari keluasan materi diatas dapat diuraikan sejauh mana kedalaman materi yang akan disampaikan kepada siswa. Berikut uraian dari keluasan materi yang akan disampaikan kepada siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Soreang:

a. Pengertian Pelanggaran HAM

Secara yuridis, menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku :

b. Bentuk-Bentuk pelanggaran HAM

Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, sebagai berikut:

- 1) Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau

penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan.

- 2) Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga.

Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan sebagainya.
- 2) Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya.

Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- 1) Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
 - a. membunuh anggota kelompok.
 - b. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.

- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
 - d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :
- a. Pembunuhan.
 - b. Pemusnahan.
 - c. Perbudakan.
 - d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
 - e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
 - f. Penyiksaan.
 - g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
 - h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis

kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional

- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid, yaitu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa dari suatu ras atau bangsa.

3) Penyebab Pelanggaran HAM

- a. Faktor Internal, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran.
- b. Faktor Eksternal, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasa aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi.

4) Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

- a. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas.
- b. Penyerbuan Kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini lima orang tewas, 149 orang luka-luka dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan empat terdakwa dinyatakan bebas dan satu orang terdakwa divonis 2 (dua) bulan 10 hari.
- c. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 5 (lima) orang tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis dua terdakwa dengan hukuman 4 (empat) bulan penjara,

empat terdakwa divonis 2 - 5 bulan penjara dan 9 orang anggota Brimob dipecaat dan dipenjara 3-6 tahun.

- d. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini lima orang tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan lima orang korban meninggal.

5) Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM

a. Pembentukan Komnas HAM

Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama lima tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk satu kali masa jabatan

b. Pembentukan Instrumen HAM.

Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk

menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM.

c. Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Disamping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.

d. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM

e. Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM.

f. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Pengadilan HAM

g. Perilaku yang Mendukung Upaya Penegakan HAM di Indonesia

2. Karakteristik Materi

Dalam materi Menapaki Jalan Terjal Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia atau pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusi) semester 1 kelas XI mempunyai karakteristik sebagai berikut :

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sifat HAM adalah universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, dan bangsa (etnis). HAM harus ditegakkan demi menjamin martabat manusia seutuhnya di seluruh dunia. Hal itu tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Ada berbagai versi definisi mengenai HAM. Setiap definisi menekankan pada segi-segi tertentu dari HAM. Berikut beberapa definisi tersebut.

- a. HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia.
- b. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 butir 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 butir 1 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)
- c. HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak negara di dunia.

- d. HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.
- e. HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.
- f. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. Jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia.

3. Bahan dan Media Pembelajaran

a. Bahan

Bahan ajar adalah segala sesuatu yang digunakan pengajar dalam penyusunan desain pembelajaran. Ada beberapa jenis bahan ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran seperti: bahan ajar cetak, bahan ajar visual, bahan ajar audio visual, dan lain-lain.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan bahan ajar multimedia dan audio visual diantaranya: Laptop, Infokus, dan Speaker aktif.

b. Media

Media pembelajaran adalah sesuatu yang menjadi perantara untuk menyampaikan pesan, atau mengkomunikasikan suatu. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan Poster sebagai media pembelajaran. Selain membantu guru dalam menyampaikan materi, media Poster juga dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa menjadi fokus dan lebih aktif saat pembelajaran berlangsung.

4. Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran merupakan rangkaian atau susunan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran berlangsung. Menurut Pupuh Fathurrohman (2007, h.3) strategi belajar mengajar bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru-murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.

Berikut ini strategi pembelajaran yang telah dirancang untuk melakukan pembelajaran:

1) Pendahuluan

Berdoa, ucapan salam, mengabsen dan mengetahui kondisi siswa (pakaian, kebersihan kelas, tertib), menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

2) Kegiatan Inti

Mengadakan free test secara lisan, guru menjelaskan materi yang akan disampaikan, menayangkan poster mengenai pelanggaran HAM.

~ Mengamati

Siswa mengamati poster yang ditayangkan oleh guru.

~ Menanya

Siswa mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan poster mengenai materi pelanggaran HAM.

~ Mengeksplorasi

Siswa mengumpulkan data tentang pelanggaran HAM.

~ Mengasosiasi

Siswa menganalisis dan mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan materi pelanggaran HAM.

~ Mengkomunikasikan

Mempresentasikan hasil analisis simpula tentang penayangan poster yang berkaitan dengan pelanggaran HAM

~ Penutup

Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

5. Sistem Evaluasi

Sistem evaluasi merupakan suatu sistem penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami, menerima dan menalar materi yang diberikan pada saat pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 58 (1) “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses berkelanjutan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerima, memahami, menalar materi yang telah disampaikan guru.

Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (dalam Pupuh Fathurohman, 2007, h.17) menyatakan bahwa evaluasi memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Merangsang kegiatan siswa
- b. Menemukan sebab kemajuan atau kegagalan belajar
- c. Memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan bakat masing-masing siswa

- d. Memperoleh bahan laporan tentang perkembangan siswa yang diperlukan orang tua dan lembaga pendidikan
- e. Untuk memperbaiki mutu pelajaran/cara belajar dan metode mengajar.

Evaluasi terbagi menjadi dua teknik yaitu dengan menggunakan tes dan non-tes. Tes adalah suatu pertanyaan atau tugas yang ditujukan untuk memperoleh data tentang tingkat kemampuan siswa. Sedangkan Non-tes adalah suatu peranan penting dalam rangka evaluasi hasil belajar siswa dari segi ranah sikap dan ranah keterampilan.

F. Hasil Peneliti Terdahulu

Penelitian ini didorong juga oleh adanya beberapa peneliti terdahulu yang menggunakan metode Enam Topi Berpikir (*Six Thinking Hats*) seperti skripsi Ratna Rizky Wulandari mengenai “Penerapan Metode *Six Thinking Hats* Edward De Bono dalam Pembelajaran Diskusi”. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen pada kelas XI SMK Negeri 13 Bandung tahun ajaran 2009/2010. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan keterampilan berbicara siswa. Kemampuan akhir siswa dilihat setelah kedua kelas mengalami perlakuan. Pada kelas eksperimen diberi metode Enam Topi Berpikir (*Six Thinking Hats*) dan pada kelas kontrol diberi metode diskusi kelompok. Kemampuan akhir siswa setelah diberi perlakuan di kelas eksperimen maupun kontrol meningkat dibandingkan pada saat pretest. Nilai rata-rata posttest di kelas eksperimen sebesar 78,4 % dan pada kelas kontrol 65,95 %. Hal ini membuktikan bahwa terdapat peningkatan kemampuan keterampilan berbicara siswa di kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Akan tetapi, rata-rata nilai kelas eksperimen yang memakai metode Enam Topi Berpikir (*Six Thinking Hats*) lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol yang hanya diberi metode diskusi kelompok.

Selain itu, skripsi Eva Dewi Nur Kholifah mengenai “Peningkatan Pembelajaran Menulis Argumentasi Siswa dengan Menggunakan Metode Topi Pemikiran (Six Thinking Hats) De Bono” dan skripsi Silvia Rani Mutia Diah Pahala mengenai “Efektivitas Penggunaan Metode Enam Tahapan Berpikir (Six Thinking Hats) dalam Pembelajaran Menulis Biografi” dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Enam Topi Berpikir (Six Thinking Hats) telah memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran, baik bagi guru maupun bagi siswa.